

GLOBAL KOMUNIKA

Jurnal Ilmiah Fisip UPN "Veteran" Jakarta

- ▶ **INTERVENSI MILITER PERANCIS DALAM KONFLIK INTERNAL DI MALI TAHUN 2013**
Imelda Masni Juniaty Sianipar
- ▶ **KEKUATAN IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA ERA GLOBALISASI DALAM KAJIAN NILAI BUDAYA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL**
Aniek Irawatie
- ▶ **TREND BERHIJAB TERHADAP PERILAKU KONSUMEN (STUDI PADA BRAND SUCHI!)**
Fitria Ayuningtyas
- ▶ **KEGIATAN CHARITY PT INTI TAMA KARSA DALAM MENCIPTAKAN CITRA POSITIF PADA PERUSAHAAN OUTSOURCHING**
Ilona Vicenovie Oisina Situmeang
- ▶ **PENGUNAAN FORUM KOMUNITAS BERBASIS WEB (ONLINE) SEBAGAI MEDIUM KOMUNIKASI PEMASARAN DI INTERNET (STUDI TERHADAP SITUS WWW.KASKUS.CO.ID)**
Windhi Tia Saputra
- ▶ **MENJUAL LEWAT POSTER FILM; PENDEKATAN SEMIOTIKA TERHADAP POSTER FILM DI INDONESIA SEBAGAI MEDIA PERIKLANAN**
Ahmad Zakki Abdullah
- ▶ **HUMAN RELATIONS INTERNAL PUBLIC PADA KONTEKS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM SEBUAH PERUSAHAAN**
Satino
- ▶ **UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UKM SEKTOR TEKSTIL MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**
Nurmasari Situmeang, Shanti Darmastuti, Asep Kamaluddin Nashir
- ▶ **PERAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**
Ujang Komarudin
- ▶ **GLOBALISASI DAN KEPEMIMPINAN DI INDONESIA "Sebuah Refleksi Nilai- Nilai Pancasila "**
Surahmad & Iswahyuni



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

GLOBAL KOMUNIKA

Jurnal Ilmiah FISIP UPN "Veteran" Jakarta

PERSONALIA PENGELOLA JURNAL ILMIAH

PENANGGUNG JAWAB DEKAN FISIP

Dr. Fredy Buhama Lumban Tobing

PEMIMPIN REDAKSI

Dra. Nurmasari Situmeang, M.Si

SEKRETARIS

Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag., M.Si

BENDAHARA

Ir. Iswahyuni Adil, M.M

PENYUNTING AHLI

Dr. Soemardi Dahlan
(Dikti)

DEWAN PENYUNTING

Shanti Darmastuti, S.IP., M.Si

SIRKULASI

Ana Kuswanti, M.Ikom

LAYOUT

Hendrik Okta A, S.kom

ALAMAT PENERBIT

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu

Jakarta Selatan 12450

Telp. +62 21 7656971 Ext. 156

Email: globalkomunika_fisip_upnvj@yahoo.com

Pertama Terbit : Juni 2009

Frekwensi : 2 kali Satu tahun

KATA PENGANTAR

Dinamika permasalahan global menurut akademisi untuk merespon secara proaktif melalui karya ilmiah yang lebih komunikatif. Tuntutan ini merupakan sebuah keniscayaan sehingga akan menciptakan sinergi antara akademisi, masyarakat dan pemerintah.

Pada edisi kali ini jurnal Global Komunika volume V Nomor 1, September 2015 - Februari 2016 menyajikan beberapa analisis dari tenaga pengajar di bidang ilmu komunikasi dan hubungan internasional. Hasil analisis tersebut adalah Intervensi militer Perancis dalam konflik internal di Mali tahun 2013, Kekuatan identitas nasional bangsa Indonesia era globalisasi dalam kajian nilai budaya sebagai kearifan lokal. Trend berhijab terhadap perilaku konsumen (studi pada brand such!), kegiatan *charity* PT. Inti Tama Karsa dalam menciptakan citra positif pada perusahaan *outsourcing*, Penggunaan forum komunitas berbasis web (*online*) sebagai medium komunikasi pemasaran di internet (studi terhadap situs www.kaskus.co.id). menjual lewat poster film: pendekatan semiotika terhadap poster film di Indonesia sebagai media periklanan, *Human relations internal public* pada konteks gaya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan, Upaya pemerintah daerah kabupaten Bogor dalam meningkatkan daya saing UKM sektor tekstil menghadapi Asean Economic Community, dan Peran partai politik dalam kebijakan pembangunan, serta globalisasi dan kepemimpinan di Indonesia "sebuah refleksi nilai- nilai pancasila "

Kami berharap jurnal global komunika ini dapat menjadi ajang publikasi hasil penelitian, hasil analisis, maupun hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi dunia akademisi.

Akhir kata redaksi mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu dengan tulus dari proses pengumpulan bahan, pengeditan dan percetakan serta semua pihak yang berperan sehingga saat ini jurnal Global Komunika Volume V Nomor 1 bisa sampai di tangan pembaca. Tak lupa redaksi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kepada para pembaca kami menunggu dan berharap koreksi serta kritik yang membangun untuk perbaikan dan untuk menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

INTERVENSI MILITER PERANCIS DALAM KONFLIK INTERNAL DI MALI TAHUN 2013 Imelda Masni Juniaty Sianipar	1-8
KEKUATAN IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA ERA GLOBALISASI DALAM KAJIAN NILAI BUDAYA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL Aniek Irawatie	9-17
TREND BERHIJAB TERHADAP PERILAKU KONSUMEN (STUDI PADA BRAND SUCH!) Fitria Ayuningtyas	18-25
KEGIATAN CHARITY PT INTI TAMA KARSA DALAM MENCIPTAKAN CITRA POSITIF PADA PERUSAHAAN OUTSOURCHING Ilona Vicenovie Oisina Situmeang	26-38
PENGUNAAN FORUM KOMUNITAS BERBASIS WEB (ONLINE) SEBAGAI MEDIUM KOMUNIKASI PEMASARAN DI INTERNET (STUDI TERHADAP SITUS WWW.KASKUS.CO.ID) Windhi Tia Saputra	39-44
MENJUAL LEWAT POSTER FILM; PENDEKATAN SEMIOTIKA TERHADAP POSTER FILM DI INDONESIA SEBAGAI MEDIA PERIKLANAN Ahmad Zakki Abdullah	45-50
HUMAN RELATIONS INTERNAL PUBLIC PADA KONTEKS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM SEBUAH PERUSAHAAN Satino	51-57
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UKM SEKTOR TEKSTIL MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Nurmasari Situmeang, Shanti Darmastuti & Asep Kamaluddin Nashir	58-66
PERAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Ujang Komarudin	67-76
GLOBALISASI DAN KEPEMIMPINAN DI INDONESIA “Sebuah Refleksi Nilai-Nilai Pancasila” Surahmad & Iswahyuni	77-84

GLOBALISASI DAN KEPEMIMPINAN DI INDONESIA

“Sebuah Refleksi Nilai- Nilai Pancasila ”

Surahmad & Iswahyuni

(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jakarta)

Abstract

This paper attempts to provide a comprehensive overview of the impact of globalization with the character of the leadership of Indonesia. In principle, Indonesia has a great value, namely Pancasila, yet profound lack of understanding, lack of knowledge as well as the interpretation and implementation digested less appropriate constraint tersediri in reflecting values - values of Pancasila on the way of leadership in Indonesia

Globalization brings change risks for all human beings as part of the nation to adapt and make changes. Globalization can put a nation as a subject of such change or object of such changes.

In terms of leadership affect the process or give examples of leaders to followers in an effort to achieve the goal. While Pancasila is a collection of ideas or the ideas of thinkers compiled systematically Indonesian nation and considered thoroughly excavated from ceminan man and his life, both as an individual, social and national life in Indonesia

Keyword : leadership, globalization, pancasila, values

Pendahuluan

Globalisasi membawa semua manusia untuk berinteraksi tanpa batas. Hal tersebut membawa resiko perubahan bagi semua manusia sebagai bagian dari bangsanya untuk menyesuaikan diri dan melakukan perubahan. Namun perubahan tersebut tidak semua di ikuti oleh kemajuan dari sebuah bangsa. Globalisasi bisa menempatkan suatu bangsa sebagai subjek dari perubahan tersebut atau objek dari perubahan tersebut. Sebagai subjek, tentu bangsa tersebut berubah sesuai dengan kebutuhannya. Sementara bagi bangsa yang menjadi objek, perubahan merupakan bangsa yang terjebak dalam perubahan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan hal yang positif dalam arus globalisasi tersebut maka bangsa Indonesia membentenginya dengan kepemimpinan yang berbasis pancasila.

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan. Dalam konteks ini Kepemimpinan merupakan suatu subjek yang telah lama diminati oleh para ilmuwan maupun untuk orang awam. Istilah tersebut berisi konotasi mengenai citra individu-individu yang berkuasa dan dinamis yang telah berhasil memimpin armada yang menang perang, yang dapat mengendalikan kerajaan-kerajaan korporasi dari atas gedung-gedung pencakar langit yang sangat berkilauan, atau yang mengarahkan kemana tujuan bangsa-bangsa. Sedangkan Pancasila merupakan

kumpulan ide atau gagasan yang disusun para pemikir bangsa indonesia secara sistematis dan dianggap menyeluruh yang digali dari ceminan manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideology karena pertama, merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain kedua hal tadi, dia juga memiliki metode praktis untuk bisa diterapkan, dijaga eksistensinya dan disebarakan.

Membangun Kemandirian Bangsa

Membangun kemandirian bangsa berarti memahami poses kemandirian sebagai suatu usaha membangun bangsa yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan bermartabat. Dengan umur bangsa yang sudah masuk 70 tahun, sudahkan bangsa ini mandiri? Sudahkan Bangsa ini mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera? Dan sudahkan bangsa ini memiliki martabat yang sehingga tidak lagi ada bangsa lain yang melecehkan? Maka sangat penting kiranya membangun bangsa yang mandiri ditengah pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia dan di era globalisasi yang sangat berpengaruh ini.

Dari sisi usia sejak negeri ini merdeka, seharusnya sudah mampu menjadi negara yang

da belas kasihan negara ngaruh kondisi gejalak dalam roda perekonomian memiliki kebanggaan atas sendiri sebagai pembuktian saan ilmu pengetahuan dan alimat di atas memberikan ber Daya Manusia sebagai unsur yang kritis dalam setiap proses pengembangan suatu entitas tertentu. Penggalan kalimat tersebut ikut menekankan pentingnya faktor manusia atau SDM sebagai komponen terpenting dalam setiap proses atau rantai nilai apapun juga. Dalam kasus pembangunan karakter bangsa Indonesia, Sumber Daya Manusia terutama generasi muda Indonesia juga merupakan komponen penting bagi keberhasilan pembangunan karakter bangsa itu sendiri dengan mengimplementasikan rantai nilai dari Pancasila.

Sejalan dengan hal tersebut, maka unsur pokok pembangunan kemandirian bangsa terfokus pada tiga aspek penting yaitu :

1. Peran kritis sumber daya manusia sebagai sumber daya yang terus diperbarui untuk melakukan pembangunan bangsa yang berkesinambungan.
2. Peningkatan daya saing dari sumber daya manusia tersebut, sebagai jaminan dari kemandirian bangsa yang berkesinambungan.
3. Pemahaman mengenai pentingnya mencetak mentalitas daya saing yang berdasarkan pada suatu rantai nilai (Pancasila) dengan tatanan dan urutan tertentu. Sehingga keberhasilan pembangunannya tergantung dari tingkat pemenuhan kriteria dan persyaratan tersebut.

Ketiga aspek pembangunan kemandirian bangsa tersebut tentu membutuhkan suatu agents yang dapat mengimplementasikan hal diatas. Dan agents itu adalah generasi muda yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Generasi muda yang umumnya masih berusia produktif diharapkan dapat memiliki kemampuan yang tanggap khususnya dalam mengakselerasi proses internalisasi pengetahuan dan menjadi motor penggerak perubahan atau generator of change sesuai dengan cita-cita pembangunan berdasarkan pada Pancasila.

Dalam kompetisi global, pilihan sebuah bangsa adalah mandiri atau tertinggal. Dalam konteks itu, Indonesia berkejaran dengan waktu sebab bangsa-bangsa di dunia ketiga terus meningkatkan kemandiriannya. Bila mentalitas

elite politik kita tak berubah secara fundamental, Indonesia akan kian terbelakang di kawasan Asia Timur. Dalam iklim mentalitas birokrasi Indonesia yang korup, bantuan asing yang fenomenal untuk Aceh bisa meninabobokan Indonesia tetap menjadi negara yang tingkat kemandiriannya rendah.

Transformasi mentalitas bangsa menuju kemandirian dapat dipercepat lewat kehadiran pemimpin bangsa yang jeli memanfaatkan momentum solidaritas nasional maupun global untuk membangun Indonesia pasca tsunami. Hibah dan bantuan luar negeri seyogianya untuk proyek-proyek yang menunjang kemandirian bangsa, seperti pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Globalisasi membawa dampak luas pada berbagai bidang kehidupan terutama ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan gejala mondial yang ditandai dengan aktivitas bisnis dan perdagangan antar negara yang kian massif dan intensif. Globalisasi menafikan batas-batas negara sehingga manakala terjadi gejolak ekonomi di suatu wilayah/regional maka akan berimbas pada perekonomian wilayah lain seperti yang terjadi saat ini ketika Amerika Serikat ditimpa kredit macet perumahan maka dampaknya terhadap perekonomian kita juga terasa yaitu penurunan nilai rupiah dan IHSG. Kita tidak bisa memungkiri bahwa faktor eksternal sangat berpengaruh dalam perekonomian negara kita terutama gejolak financial dan melambungnya harga minyak mentah dunia. Tetapi paling tidak kita harus memiliki basic sistem perekonomian yang tahan terhadap gejolak ekonomi dunia seperti yang contohkan oleh Thailand, Malaysia dan Korea yang sudah mampu keluar dari krisis tahun 1997 yang lalu.

Sebenarnya kita pernah memiliki sebuah sistem ekonomi yang disebut dengan Ekonomi Kerakyatan yang memberikan kesempatan secara luas pada masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Kerakyatan adalah tatanan ekonomi dimana aset ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara (Mardi Yatmo Hutomo, BAPENAS). Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD '45, khususnya pasal 33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Kemudian, karena bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga hak-hak kesejahteraan ekonomi (*economic rights*) bisa terpenuhi. Yang terjadi saat ini adalah sebaliknya, kemampuan masyarakat di dalam memenuhi hak kesejahteraannya begitu rendahnya. Disisi lain kepemilikan modal atas korporasi yang mengeksploitasi SDA dimiliki oleh pihak asing sehingga keuntungan banyak mengalir keluar negeri. Begitu pula dengan produk barang dan jasa, hanya dikuasi oleh segelintir orang.

Menurut Laica Marzuki (penerapan sistem ekonomi kerakyatan), Fakta empirik menjelaskan bahwa, Produsen barang dan jasa private jumlahnya terbatas. Yang memproduksi 78,5 persen output nasional dalam bentuk barang dan jasa private hanya oleh 200 orang warga negara. Sedang 21,5 persen output nasional diproduksi oleh jutaan orang warga negara melalui usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Sementara 89,5 persen tenaga kerja yang ditawarkan di pasar input dibeli oleh 99,5 persen produsen yang outputnya hanya 21,5 persen. Sedang hanya 10,5 persen tenaga kerja yang dibeli oleh 0,5 persen produsen yang outputnya 78,5 persen. Sebaliknya, modal yang pergunakan oleh 0,5persen produsen mencapai sekitar 85 persen dari modal yang ada dalam perekonomian, dan tidak lebih dari 7 persen modal yang dipergunakan oleh 95,5 persen produsen. Dalam situasi yang demikian, maka diduga kuat:

- (1) Tidak pernah terjadi market clearing baik di pasar input maupun di pasar output,
- (2) Ada modal yang idle (nganggur) dalam perekonomian,
- (3) Ada tenaga kerja yang idle dalam perekonomian,
- (4) Perekonomian tidak efisien,
- (5) Perekonomian tidak memproduksi barang dan jasa sesuai kapasitas yang dimiliki, dan
- (6) Terjadi kesenjangan ekonomi antar golongan penduduk yang amat lebar.

Melihat kondisi bahwa sistem kapitalisme hanya memberikan kemakmuran pada segelintir orang (globalisasi tidak bisa melepaskan dari sistem ini), sudah saatnya pemerintah menumbuhkan kembali semangat ekonomi kerakyatan. Semangat ini dilandasi pada distribusi keadilan baru kemudian kemakmuran bukan sebaliknya. Distribusi sumber-sumber ekonomi yang merata akan menciptakan pendapatan yang merata pula sehingga pada gilirannya tercipta kemakmuran.

Dengan mayoritas pelaku ekonomi kita adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sudah saatnya keberpihakan pemerintah dan Bank terhadap usaha ini lebih diintensifkan lagi. Nampaknya usaha pemerintah pada UKM dan rakyat kecil ini mulai terlihat pada program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat (iklannya bisa kita lihat di layar TV) dan Bank-bank juga mulai mengucurkan kredit tanpa agunan.

Membina Karakter Bangsa

Pembinaan Karakter Bangsa adalah upaya sistematis suatu negara berkebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan karakter bangsa dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan negara.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa ini dibangun dari kehendak yang sama untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa untuk mewujudkan empat tujuan negara yaitu melindungi segenab bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Tentu saja cita-cita tersebut tidak mudah direalisasikan. Bangsa ini memiliki banyak pengalaman ancaman dan tantangan yang menghambat cita-cita tersebut. Sungguh beruntung, pancasila senantiasa menunjukkan nilai-nilai keluhurannya. Hal ini bukan saja berhasil digali oleh para pendiri bangsa tetapi juga direalisasikan dalam pembebasan dari penjajahan. Sudah saatnya, generasi saat ini memantapkan dan mengakualisasikan kembali nilai-nilai pancasila untuk memandu jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memecahkan berbagai permasalahannya. Bangsa ini memerlukan orang-orang berkualitas, orang-orang berkarakter kebangsaan, atau orang-orang pancasilais sebagaimana teladan yang diberikan para pendiri bangsa.

Semangat dan cita-cita kebangsaan telah dideklarasikan para pendiri bangsa (*founding*

fathers). Para pendiri bangsa mampu menggali nilai-nilai budaya luhur bangsa (atau disebut filsafat Pancasila maupun filsafat keagamaan). Pemahaman terhadap falsafah kebangsaan telah menghasilkan semangat juang para pendahulu sehingga membebaskan dari belenggu penjajahan. Falsafah Pancasila yang dilandasi nilai-nilai sejarah, cita-cita dan ideologi, juga berfungsi memandu bangsa Indonesia memandang dinamika kehidupan dan menentukan arah pembangunan menuju masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Fenomena globalisasi berpengaruh kepada pergeseran atau perubahan tata nilai, sikap dan perilaku pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan yang positif dapat memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan mengembangkan kehidupan nasional yang lebih berkualitas. Tuntutan dan aspirasi masyarakat terakomodasi secara positif disertai upaya-upaya pengembangan, peningkatan pemahaman, penjabaran, pemasyarakatan, dan implementasi Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Adapun perubahan yang negatif harus diwaspadai sejak dini serta melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.

Menurut Noorsyam (2009), filsafat pancasila memberi tempat yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia (sebagai implementasi sila pertama dan kedua Pancasila). Karenanya setiap manusia seyogyanya mengutamakan asas normatif religius dalam menjalankan kehidupannya. Manusia diberi oleh Tuhan kemampuan berbagai ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugas kekhalfahannya. Manusia diminta untuk mengelola seluruh alam dan seisinya dan diperuntukkan bagi umat manusia.

Indonesia memiliki potensi ilahiyah, dan bisa merealisasikan potensi ilahiyahnya menjadi manfaat seluruh bangsa ; Hasibuan (2003). Dengan menunaikan kekhalfahan itu, manusia senantiasa mengalami pembelajaran. Pembelajaran diperlukan agar bangsa Indonesia dapat melalui tantangan internal maupun global dan berbagai dinamikanya. Proses pembelajaran dan iptek diharapkan menghasilkan kemampuan adaptasi atau justifikasi proses kehidupan dan menjalankan inovasi untuk menciptakan kualitas dan daya saing yang makin baik. Daya saing hanya akan meningkat, seiring dengan proses pembelajaran yang rasional dan kritis serta kreativitas di kalangan masyarakat.

Nilai-nilai pancasila sebagai falsafah hidup

bangsa perlu diimplementasi untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Semangat juang itu bukan saja untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Poespowardojo dan Hardjatno, 2010). Lahirnya SDM yang berkualitas sangat relevan untuk mengantisipasi keadaan dan perubahan lingkungan strategis.

Bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpinan nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional dilandasi paradigma nasional dengan kemampuan memantapkan integrasi bangsa dan solidaritas nasional, mementingkan stabilitas nasional untuk meningkatkan rasa kebangsaan, memahami perubahan dan melaksanakan pembaharuan dalam manajemen pemerintahan dan upaya pencarian solusi untuk menangani permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin pada berbagai tingkatan dan hirarki, merupakan penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan nasional dalam pembangunan nasional.

Kepemimpinan nasional membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi bangsa, serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama yang bermanfaat. Kepemimpinan nasional harus dapat mengawal manajemen pembangunan dalam rambu-rambu *good governance*, mendorong berfungsinya kelembagaan pemerintahan, pembangunan pendidikan, dan pembangunan hukum dan aparatur dalam rangka pembangunan nasional.

Pembangunan pendidikan secara umum bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan (masyarakat dan pemerintahan) dalam prinsip-prinsip keteladanan, moral dan etika sesuai falsafah hidup bangsa berdasarkan Pancasila. Kepemimpinan dalam keluarga, sekolah, kemasyarakatan dan pemerintahan wajib menjalankan prinsip-prinsip pendidikan tersebut, dan menjadi sumber motivasi dan inspirasi lahirnya kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan diharapkan lahir kualitas SDM yang memiliki moral dan akuntabilitas individu, sosial, institusional dan global (Lemhannas, 2009) yang akan mengantarkan menjadi Indonesia

yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Karakter multikultur bangsa merupakan sumber kekayaan iptek nasional, sebagai modal dasar pembangunan nasional. Potensi tersebut perlu dioptimalkan pemanfaatannya melalui kepemimpinan yang memiliki kompetensi manajemen pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aspek lain yang tidak kalah penting untuk diperhitungkan dalam melakukan pembinaan karakter bangsa adalah pengaruh dari kemajuan kapasitas berpikir manusia itu sendiri yang pada umumnya diartikulasikan dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu teknologi informasi dan telekomunikasi. Kedua jenis teknologi tersebut secara radikal telah mengakselerasi proses interaksi antar manusia dari berbagai bangsa dan memberikan dampak adanya amalgamasi berbagai kepentingan lintas bangsa (globalisasi). Dan salah satu unsur yang ada dalam proses amalgamasi kepentingan antar manusia adalah daya saing atau competitiveness. Pentingnya kemampuan daya saing bagi suatu bangsa untuk dapat menjadi bangsa yang mandiri di era globalisasi tersebut sehingga dibutuhkan suatu pembinaan karakter bangsa termasuk juga bagi bangsa Indonesia.

Menurut Michael Porter (1999), dalam bukunya *Daya Saing sebuah Bangsa (The Competitiveness of A Nation)*, pemahaman daya saing sebagai salah satu keunggulan yang dimiliki suatu entitas dibandingkan dengan entitas lainnya. Keunggulan yang dimaksud dapat berkembang ke berbagai pengertian maupun penerapan. Keunggulan tersebut dapat diartikan sebagai keunggulan ekonomi, keunggulan politik, keunggulan militer dan lain-lain. Sedangkan, daya saing pada esensinya dapat diartikan sebagai sebuah rantai dari suatu nilai proses yang dapat dikendalikan dengan proses pembelajaran kontinyu atau continuous learning. Sehingga, arti dan makna pembinaan karakter bangsa di era globalisasi yang sarat dengan daya saing adalah menyangkut tiga hal pokok yaitu :

1. Artikulasi karakter bangsa adalah mengacu pada tingkat peningkatan kapasitas pengetahuan dari bangsa tersebut untuk terus melakukan pembelajaran agar semakin meningkat daya saingnya di era globalisasi.
2. Pembinaan karakter bangsa akan diarahkan agar kapasitas pengetahuan yang terbangun dapat meningkatkan daya saing suatu bangsa, dengan kondisi dimana daya saing tersebut akan memungkinkan adanya kemajuan kolektif atau kemajuan bersama bagi bangsa

Indonesia.

3. Pemaknaan dari karakter positif bangsa seharusnya diarahkan untuk mencapai dua hal pokok di atas.

Sebenarnya bangsa Indonesia telah memiliki karakter positif bangsa yang seharusnya terus ditumbuh-kembangkan untuk menjadi bangsa yang mandiri di era globalisasi ini. Karakter positif yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut antara lain adalah karakter pejuang yang juga telah diakui oleh masyarakat internasional karena Indonesia mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangan tumpah darah bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki karakter pemberani dan sejumlah karakter positif lainnya yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai bekal untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan mandiri di era globalisasi. Seluruh karakter positif yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut harus dimaknai dalam konteks peningkatan daya saing untuk menghadapi globalisasi. Sehingga pembinaan karakter positif bangsa dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam era globalisasi.

Namun disisi lain, bangsa Indonesia masih didera oleh sejumlah permasalahan dalam pembinaan karakter bangsa bahkan yang paling kritis justru yang menyangkut masalah daya saing bangsa Indonesia, sebuah parameter yang semakin meningkat nilai pentingnya di era globalisasi saat ini. Meskipun demikian, pembinaan karakter bangsa Indonesia terus dilaksanakan secara terus-menerus demi terciptanya generasi muda penerus bangsa yang memiliki mental saing kuat dalam menghadapi globalisasi. Pembinaan karakter bangsa Indonesia juga dilandasi oleh nilai-nilai dasar Pancasila yang akan penulis kaji dalam pembahasan berikutnya.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KARAKTER BANGSA

a. Lingkungan Global

Globalisasi dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan internasionalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran dan batas-batas suatu negara yang disebabkan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk interaksi. Globalisasi juga dapat memacu pertukaran arus manusia, barang, dan informasi tanpa batas. Hal itu dapat menimbulkan dampak terhadap penyebaran pengaruh budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi dan agama dalam suatu

fathers). Para per-
nilai-nilai bud-
filsafat Pang-
Pemahaman
mengh-
seh-
P-

ositif
ncapai
bangsa
du

n. Pada gilirannya hal
diri bangsa.
tersebut, globalisasi
terhadap pola berpikir
n bangsa Indonesia,
generasi muda yang
oleh nilai-nilai dan
dengan kepribadian
nesia. Untuk itu,
yang tepat dan sesuai

agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tidak kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

b. Lingkungan Regional

Pada lingkungan regional, pengaruh globalisasi juga membawa dampak terhadap terkikisnya budaya lokal di zona negara-negara Asia Tenggara. Dampak tersebut berwujud adanya ekspansi budaya dari negara-negara maju yang menguasai teknologi informasi. Meskipun telah dilaksanakan upaya pencegahan melalui program kerja sama kebudayaan, namun melalui teknologi informasi yang dikembangkan, pengaruh negara lain dapat saja masuk.

Perkembangan regional Asia atau lebih khusus ASEAN dapat membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

c. Lingkungan Nasional

Perkembangan politik di dalam negeri dalam era reformasi telah menunjukkan arah terbentuknya demokrasi yang baik. Selain itu telah direalisasikan adanya kebijakan desentralisasi kewenangan melalui kebijakan otonomi daerah. Namun, sampai saat ini, pemahaman dan implementasi konsep demokrasi dan otonomi serta pentingnya peran pemimpin nasional masih belum memadai. Sifat kedaerahan yang kental dapat mengganggu proses demokrasi dan bahkan mengganggu persatuan nasional.

Harus diakui bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia sejak lebih dari enam puluh tahun merdeka. Pembangunan fisik dimulai dari zaman orde lama, orde baru, orde reformasi hingga pasca reformasi terasa sangat pesat, termasuk pembangunan infrastruktur

pendukung pembangunan yang mencapai tingkat kemajuan cukup berarti.

Kemajuan di bidang fisik harus diimbangi dengan pembangunan nonfisik, termasuk membina karakter dan jati diri bangsa agar menjadi bangsa yang kukuh dan memiliki pendirian yang teguh. Sejak zaman sebelum merdeka hingga zaman pasca reformasi saat ini perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan karakter terus mendapat perhatian tinggi. Pada awal kemerdekaan pembangunan pendidikan menekankan pentingnya jati diri bangsa sebagai salah satu tema pokok pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Lama, Nation and Character Building merupakan pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Baru, pembinaan karakter bangsa dilakukan melalui mekanisme penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada zaman Reformasi, sejumlah elemen kemasyarakatan menaruh perhatian terhadap pembinaan karakter bangsa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Nilai - Nilai Pancasila

a. Pancasila sebagai Landasan Pembangunan

Pancasila sebagai landasan pembangunan berarti nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi logis terhadap pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia termasuk dalam melaksanakan pembangunan karakter bangsa. Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Sedangkan Pembangunan nasional Indonesia diarahkan pada upaya peningkatan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Sehingga, pembangunan nasional bangsa Indonesia dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat manusia secara total atau menyeluruh berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam pancasila.

Dalam melaksanakan pembangunan sosial berdasarkan pancasila maka pembangunan sosial tersebut harus bertujuan untuk mengembangkan harkat dan martabat manusia secara total. Oleh karena itu, pembangunan yang berdasarkan pancasila harus dilaksanakan di berbagai bidang

yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan dengan berlandaskan pada Pancasila tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penulis akan dijelaskan mengenai Pancasila sebagai landasan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan berikutnya.

b. Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Politik Indonesia

Pembangunan politik yang berdasarkan pada Pancasila harus dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dan meningkatkan harkat dan martabat manusia tersebut adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga, sistem politik Indonesia harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang sesuai dengan Pancasila yaitu sistem politik demokrasi (kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.

Sebagai konsekuensi logis dari sistem politik demokrasi yang berlandaskan pada moral Pancasila maka perilaku politik, baik perilaku politik warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.

Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Sistem dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan Pancasila yaitu berlandaskan pada nilai moral dari Pancasila itu sendiri. Secara khusus, sistem ekonomi Pancasila harus didasari oleh moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan kemanusiaan (humanistis) akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan.

Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak

dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

c. Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya.

Berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya di seluruh Indonesia menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan sosial budaya berdasarkan pada Pancasila tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

d. Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Pertahanan Keamanan Indonesia

Sistem pertahanan dan keamanan sesuai Pancasila adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan bangsa sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin

fathers). Para per... negara Kesatuan
nilai-nilai buda... kan Pancasila
filsafat Pan... positif bangsa
Pemahaman... mencapai dua
mengh... miliki
sehari-hari...
P...
... ang tegas
... adalah
... (s) yang
... dengan
... gunan
... oleh bangsa
... di bidangekonomi,
... dan pertahanan-keamanan
... untuk meningkatkan daya saing
... Indonesia dalam menghadapi globalisasi.
Namun untuk mencapai daya saing yang kuat
tersebut dibutuhkan kekuatan kepemimpinan yang
berkarakter dan senantiasa berupaya membina
keutuhan nilai – nilai pancasila dalam kehidupan
sehari – hari. Pembinaan kepemimpinan dimasa
mendatang sangat berkaitan dengan pembinaan
karakter generasi muda bangsa Indonesia yang
sudah seharusnya sesuai dengan pancasila,
khususnya karakter positif bangsa dan harus
terus ditumbuh-kembangkan untuk memperkuat
kemampuan adaptif dari daya saing bangsa
sehingga dapat menjadi bangsa yang mandiri di era
globalisasi. Dalam upaya untuk mengaktualisasikan
kemandirian tersebut, maka dituntut peran penting
dari generasi muda Indonesia sebagai character
enabler, character builders dan character engineer.
Meskipun untuk menjalankan ketiga peran tersebut,
generasi muda masih membutuhkan dukungan
serta bantuan dari seluruh elemen bangsa termasuk
pemerintah, namun esensi utama dari pembangunan
karakter bangsa Indonesia menuju bangsa mandiri
adalah pentingnya peran generasi muda sebagai
komponen bangsa yang paling strategis posisinya
dalam memainkan proses transformasi karakter
dan tata nilai pancasila di era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Arep, Ishak dan Hendri Tanjung. (2003).
Manajemen Motivasi. Penerbit PT.Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- A Safril Mubah, Teroris VS Globalisasi, Surabaya:
Cakra Studi Global Strategis, 2012
- Hopkins, A.G. (ed.). (2004). Globalization in World
History. London: Norton
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta:
Paradigma, 2010
- Kabul Budiyo, Pendidikan Pancasila Untuk
Perguruan Tinggi, Bandung: Alfabeta, 2014
- Kartono, Kartini. (1998). Pemimpin dan
Kepemimpinan: Apakah Pemimpinan
Abnormal Itu ? PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta
- Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila di
Perguruan Tinggi, Jakarta: Ghalia Indonesia,
2004
- Sugeng Bahagijo, Globalisasi Menghempas
Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES,
2006
- Winardi. (1990). Kepemimpinan Dalam
Manajemen. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Qodry Azizi, Melawan Globalisasi, Jakarta: Pustaka
Pelajar, 2004

yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan dengan berlandaskan pada pancasila tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penulis akan dijelaskan mengenai pancasila sebagai landasan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan berikutnya.

b. Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Politik Indonesia

Pembangunan politik yang berdasarkan pada pancasila harus dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dan meningkatkan harkat dan martabat manusia tersebut adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga, sistem politik Indonesia harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang sesuai dengan pancasila yaitu sistem politik demokrasi (kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.

Sebagai konsekuensi logis dari sistem politik demokrasi yang berlandaskan pada moral pancasila maka perilaku politik, baik perilaku politik warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.

Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Sistem dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan pancasila yaitu berlandaskan pada nilai moral dari pancasila itu sendiri. Secara khusus, sistem ekonomi pancasila harus didasari oleh moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan kemanusiaan (humanistis) akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan.

Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan adalah sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak

dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

c. Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya.

Berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya di seluruh Indonesia menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan sosial budaya berdasarkan pada pancasila tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

d. Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Pertahanan Keamanan Indonesia

Sistem pertahanan dan keamanan sesuai pancasila adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan bangsa sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara sangat sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin

keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KESIMPULAN

Demarkasi atau garis pembatas yang tegas untuk menghadapi dampak globalisasi adalah daya saing bangsa (*national competitiveness*) yang kuat untuk menjadi bangsa yang mandiri dengan berlandaskan pada Pancasila. Pembangunan berdasarkan Pancasila yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Namun untuk mencapai daya saing yang kuat tersebut dibutuhkan kekuatan kepemimpinan yang berkarakter dan senantiasa berupaya membina keutuhan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sehari – hari. Pembinaan kepemimpinan dimasa mendatang sangat berkaitan dengan pembinaan karakter generasi muda bangsa Indonesia yang sudah seharusnya sesuai dengan Pancasila, khususnya karakter positif bangsa dan harus terus ditumbuh-kembangkan untuk memperkuat kemampuan adaptif dari daya saing bangsa sehingga dapat menjadi bangsa yang mandiri di era globalisasi. Dalam upaya untuk mengaktualisasikan kemandirian tersebut, maka dituntut peran penting dari generasi muda Indonesia sebagai *character enabler*, *character builders* dan *character engineer*. Meskipun untuk menjalankan ketiga peran tersebut, generasi muda masih membutuhkan dukungan serta bantuan dari seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah, namun esensi utama dari pembangunan karakter bangsa Indonesia menuju bangsa mandiri adalah pentingnya peran generasi muda sebagai komponen bangsa yang paling strategis posisinya dalam memainkan proses transformasi karakter dan tata nilai Pancasila di era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Arep, Ishak dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen Motivasi*. Penerbit PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- A Safril Mubah, *Teroris VS Globalisasi*, Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2012
- Hopkins, A.G. (ed.). (2004). *Globalization in World History*. London: Norton
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010
- Kabul Budiyo, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Kartono, Kartini. (1998). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu ?* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Sugeng Bahagijo, *Globalisasi Menghempas Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2006
- Winardi. (1990). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Qodry Azizi, *Melawan Globalisasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004